

Berita Perdagangan bersumber dari artikel dan liputan dari dalam Depdag atau dari luar Depdag, berbagai tulisan di berbagai media lokal dan asing, kawat berita dari berbagai Perwakilan RI di luar negeri, dan informasi dari instansi/dinas perdagangan di daerah. Materi disunting dan diolah kembali oleh *Staf Komunikasi Pimpinan* pada *Pusat Humas Departemen Perdagangan*.

Dua Puluh Tahun APEC: Masih Relevankah Keberadaannya bagi Indonesia?

Singapura, 13 November 2009 — Hari ini sejumlah kepala pemerintahan ekonomi APEC mendarat di Singapura menyusul rekannya yang sudah terlebih dahulu tiba untuk mengikuti KTT APEC pada 14 dan 15 November mendatang. Mereka juga ambil bagian dalam *APEC CEO Summit*, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada sesi khusus sore hari. *APEC CEO Summit* yang diadakan menjelang KTT APEC tahunan ini dihadiri sekitar 800 pimpinan bisnis di kawasan APEC, sehingga forum ini dipandang bergengsi dan “wajib” dihadiri para kepala pemerintahan APEC. Namun, muncul pertanyaan menggelitik tentang APEC: apa sebenarnya arti keberadaan APEC? Apakah 20 tahun keberadaan APEC memberi manfaat?

Dua puluh tahun silam, ketika APEC dibentuk, dunia menyaksikan perubahan fundamental pada peta hubungan internasional: berakhirnya Perang Dingin, rontoknya Tembok Berlin, unifikasi Jerman, dan terwujudnya unifikasi Eropa. Kita menyaksikan pemetaan ulang politik dunia secara relatif damai. Di saat yang sama, tumbuhlah kesadaran akan ketergantungan ekonomi yang semakin kuat di antara negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.

Dalam lima belas tahun pertama, APEC sudah dapat menunjukkan relevansinya terhadap proses integrasi ekonomi regional. Rata-rata tarif di kawasan APEC menurun cukup tajam, dari 17% pada 1989 menjadi 5,5% pada 2004. Perdagangan intra APEC tumbuh lima kali lipat, dari US\$ 1,7 triliun pada 1989 menjadi US\$ 8,4 triliun pada 2007. Lebih jauh lagi, antara 2002 hingga 2006, prakarsa APEC berhasil menurunkan biaya-biaya transaksi di kawasan ini sebesar 5%. Di sisi lain, *APEC Business Travel Card* semakin memudahkan pebisnis APEC untuk bepergian ke sesama kawasan ekonomi APEC tanpa visa.

Kini, dua dekade kemudian, APEC berada di tengah krisis dunia terparah sejak *Great Depression*. APEC dituntut memainkan peran kunci dalam proses *rebalancing the global economy*. Tuntutan ini bukannya tidak beralasan, sebab APEC mewakili sekitar 55% GDP dunia, 45% perdagangan dunia, dan 40% penduduk dunia. Karenanya kontribusi APEC bagi upaya pemulihan ekonomi dunia akan melahirkan dampak signifikan.

Menggambarkan perkembangan APEC sepanjang 2009 ini, Menteri Perdagangan Mari Pangestu menyatakan, “selama tahun 2009 APEC terus berusaha agar agenda yang dijalankan tetap relevan dengan perkembangan perekonomian dunia. Pada awal tahun, misalnya, APEC mencoba merumuskan respon terhadap krisis keuangan

dunia. Kemudian pada pertengahan tahun, saat Pertemuan Menteri Perdagangan APEC bulan Juli, perhatian difokuskan pada upaya memposisikan APEC dalam proses pemulihan ekonomi dunia. Kini, saat para Menteri dan Kepala Pemerintahan APEC berkumpul di Singapura, kita mencoba memposisikan APEC dalam konteks pertumbuhan jangka panjang yang bersifat *balanced, inclusive* dan *sustainable*.”

Di tahun ini, salahsatu program kerja yang dirumuskan APEC untuk dilaksanakan empat tahun ke depan adalah prakarsa *Supply-Chain Connectivity*. Selama ini APEC berhasil mengedepankan agenda integrasi perdagangan dan investasi melalui tiga pilar kerjasama: liberalisasi, fasilitasi, dan kerjasama ekonomi dan teknik. Namun integrasi bukanlah sekadar menjadi “terbuka” dalam arti mengurangi seminimal mungkin hambatan-hambatan di perbatasan. Integrasi adalah juga menjadi “terhubung” atau *connected*, yakni suatu kondisi ketika hambatan-hambatan (*bottlenecks*) dalam mata rantai suplai lintas daerah dan lintas negara dikurangi semaksimal mungkin.

Menutup perbincangan, Menteri Perdagangan menggarisbawahi, “tahun ini kita mengesahkan *Supply-Chain Connectivity Framework* sebagai bagian dari upaya bersama APEC mewujudkan kegiatan bisnis di kawasan yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat. Fokus kita empat tahun ke depan adalah mewujudkan sektor logistik yang dapat menghubungkan secara lebih efisien sektor-sektor di hulu dan sektor-sektor di hilir, serta antara produsen, pengguna antara, dan pengguna akhir atau konsumen. Seluruhnya telah teridentifikasi menjadi delapan *chokepoints** dalam mata rantai suplai APEC yang akan diperbaiki. Adapun Indonesia, sebagai negara kepulauan, menegaskan akan memberi prioritas pada *national connectivity*.”

APEC—sebentuk kerjasama yang sejauh 20 tahun telah berkembang sebagai hasil proses integrasi ekonomi regional—kini memainkan peran lebih dari separuh perekonomian dunia, sekaligus merupakan rumah peradaban intens yang melahirkan banyak inovasi. Maka tidak patut rasanya jika APEC ditinggalkan. Indonesia sangat berkepentingan untuk tetap berada di dalam rumah APEC, mengikuti serta mengarahkan perkembangannya ke depan, dan ikut menjaga APEC sebagai kawasan yang paling dinamis di dunia. (*doy*)

(*Sumber: Ditjen KPI Depdag*)

—Pusat Hubungan Masyarakat, Departemen Perdagangan—
—021-23528400, pusathumas@depdag.go.id—

* (1) *lack of transparency/awareness of the full scope of regulatory issues*; (2) *inefficient or inadequate transport infrastructure*; (3) *lack of capacity of local/regional logistics sub-providers*; (4) *inefficient clearance of goods at customs*; (5) *burdensome customs documentation*; (6) *underdeveloped multi-modal transport capabilities*; (7) *variations in cross-border standards and regulations*; dan (8) *lack of regional cross-border customs-transit arrangements*.